

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMPERKOKOH JATI DIRI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA ERA GLOBAL

Sri Untari

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang
Jalan Akordion No. 30A, Malang

Abstract – In the era of globalization, universal values can erode the transcendent value and the spirit of nationality. Globalization with the presence of triple T could be a blessing or a calamity. It could be a calamity since globalization might be a threat to a nation. The threat could be in a form of modern war that threatens Indonesia in which one of the examples is undermining the spirit of nationality. Since the reformation, government policy is leaning more on the global interests than the importance of the people. Consequently, the country is getting further to reach its national aspiration. For example, education policy makes the people abandon Pancasila values in their life. The fact shows that the existing government policies are far from the efforts to strengthen the identity and national insight. Improving the quality of human resources to be competitive and innovative on one side, but with no strong national insight on the other side, have an impact on the lack of devotion to the people, thus they are more devoted to serve the investors. The paper aims to initiate government policy that is capable of strengthening the identity and national insight on the future generation of Indonesia in order to encourage the balanced attitude and behavior that always seek for harmony to build a nation with justice and dignity.

Keywords: policy; government; identity; knowledge; nationality

Abstrak – Di era globalisasi nilai-nilai universal mampu menggerus nilai luhur bangsa dan mengoyak rasa dan semangat kebangsaan kita. Globalisasi dengan ditandai adanya triple T merupakan berkah, juga dapat menjadi musibah. Sebagai musibah karena globalisasi dapat menjadi ancaman bagi suatu negara bangsa. Bentuk ancaman yang aktual adalah munculnya perang modern yang mengancam bangsa Indonesia baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri salah satunya melemahnya rasa dan semangat kebangsaan kita. Sejak reformasi kebijakan pemerintah menunjukkan fenomena keberpihakan pada kepentingan global dibandingkan kepentingan rakyat bangsanya. Sebagai akibatnya semakin jauh ketercapaian negeri ini dari cita-cita nasionalnya, misal kebijakan pendidikan justru menjadikan bangsa ini semakin jauh meninggalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan kebijakan pemerintah saat ini masih kering dari upaya memperkokoh jati diri dan wawasan kebangsaan sekaligus pemicu kemajuan di era global. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan inovatif, namun memiliki wawasan kebangsaan yang tidak cukup kuat, sehingga lebih suka mengabdi kepentingan pemodal dari pada rakyatnya. Makalah ini dimaksudkan untuk menggagas kebijakan pemerintah yang mampu memperkokoh jati diri dan wawasan kebangsaan pada generasi bangsa Indonesia untuk mendorong terciptanya sikap serta perilaku bangsa yang senantiasa mengupayakan keselarasan, keserasian, keseimbangan dalam hidup dan kehidupan, sehingga mampu menjadi bangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci: kebijakan; pemerintah; jati diri; wawasan, kebangsaan

PENDAHULUAN

Pendidikan dimaknai sebagai suatu upaya sadar untuk mem manusiakan manusia. Dalam konteks Indonesia pendidikan dipandang sebagai upaya sadar berencana untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dibangun jiwanya dan juga badannya. Pendidikan bukan sekedar usaha untuk mencerdaskan anak bangsa di bidang akademik, melainkan harus dapat membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, sehingga menjadi generasi yang cerdas dan berakhhlak mulia (*good and smart generation*). Menurut Al Hakim, dkk. (2010, h. 15) bahwa “*suatu bangsa akan menjadi besar jika generasinya memiliki karakter yang baik dan pembentukan karakter ini hanya akan terjadi melalui proses pendidikan*”.

Secara normatif pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka membangun insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, berkeadilan, bermutu, sesuai kebutuhan masyarakat lokal dan global guna membangun peradaban bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. Rencana strategis pendidikan nasional ke depan bertumpu pada terselenggaranya layanan prima untuk membentuk insan Indonesia cerdas melalui lima misi, yakni ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan serta kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

Pada era global, Indonesia dihadapkan pada pertaruhan sejarah, apakah negeri dan bangsa ini akan tetap eksis dimasa depan dengan segala tantangan yang di hadapan? Semuanya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kemampuan bangsa memperkokoh jati diri dan melakukan penguatan wawasan kebangsaan. Interaksi, interrelasi, interdependensi antara negara bangsa dalam sistem dunia (*the world system*) sangat kuat hubungannya dengan kekuatan dan pengaruh timbal balik antar negara. Di sinilah pentingnya suatu bangsa memperkokoh jati dirinya dengan memperkuat wawasan kebangsaan, sehingga di tengah dinamika dunia yang sangat kompetitif dan cenderung eksploitatif bahwa terasa imperialistik ini negara dan bangsa mampu eksis dan memiliki ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi segala hambatan, tantangan, ganguan dan ancaman dalam segala aspek kehidupan.

Kebijakan pemerintah tentang upaya memperkokoh jati diri bangsa dan memperkuat wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Menurut Untari (2010) dengan kebijakan

pemerintah yang tepat terkait dengan upaya memperkokoh jati diri dan wawasan kebangsaan, maka rancangan, pelaksanaan, arah, sasaran dan target sasaran akan lebih jelas. Keberhasilan penguatan jati diri dan wawasan kebangsaan merupakan bagian integral dari upaya mencapai visi pembangunan nasional, yakni mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong-royong, patriotik, dinamis, berbudaya dan berorientasi IPTEK berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

METODE

Penulisan ini menggunakan data yang diambil melalui kajian tentang jati diri bangsa dan wawasan kebangsaan yang bersumber dari buku-buku referensi, majalah, internet, dan jurnal baik nasional maupun internasional yang relevan dengan tema seminar yakni tentang wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa. Metode penulisan yang dipergunakan mengacu pada pedoman yang diberikan oleh panitia Seminar Nasional, yang meliputi: judul, penulis dengan alamat institusi dan emailnya, abstrak, metode, pembahasan dan penutup serta daftar pustaka.

HASIL DAN DISKUSI

Problematika Jati diri Dan Wawasan Kebangsaan

Permasalahan jati diri dan wawasan kebangsaan hakekatnya permasalahan yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Jati diri dan wawasan kebangsaan Indonesia pada pusaran arus modernisasi dan globalisasi laksana pedang bermata dua. Pada satu sisi dapat menjadi berkah, manakala dapat memengaruhi sikap perilaku baik secara pribadi dan sebagai bangsa yang lebih berkualitas atau sebaliknya menjadi musibah karena menjadikan sikap perilaku yang tidak mengindahkan kesantunan, toleransi, moralitas.

Globalisasi senyatanya menimbulkan dampak negatif terhadap jati diri dan wawasan kebangsaan, di mana dengan tiga T (teknologi, transportasi dan telekomunikas) memungkinkan bangsa Indonesia mengakses segala sesuatu mengenai negara sendiri maupun negara lain. Akibatnya memengaruhi nilai-nilai luhur yang telah ada, nilai-nilai tersebut dapat berubah menjadi lebih baik namun juga menjadi lebih buruk. Demikian juga dengan kesejadian bangsa dapat menguat dan juga dapat memudar. Bagi Indonesia, jati diri

bangsa dirasakan semakin memudar, gaya hidup, sikap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

Pembangunan nasional dan karakter bangsa (*nation and character building*) pada hakekatnya adalah membangun jati diri bangsa. Pembangunan karakter bangsa sudah diupayakan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai bentuk, namun hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Terbukti masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang besar, banyaknya pelanggaran peraturan, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja dan masyarakat, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas, dan perilaku buruk lainnya, baik yang merugikan diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya.

Karakter yang dipandang sesuai nilai-nilai luhur bangsa selama ini antara lain bahwa masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong-royong, mulai cenderung berubah menjadi perilaku individu maupun kelompok masyarakat yang mengalihkan perilaku baik berubah menjadi berperilaku tidak jujur, individualis, materialis, hedonis yang kesemuanya itu menegaskan bahwa terjadi pengeroisan jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, 3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, 5) ancaman disintegrasi bangsa, dan 6) melemahnya kemandirian bangsa (Noor, 2012; Wiyono, 2012). Sementara itu, Yudoyono (2004) menyatakan masalah yang merupakan tantangan dan ancaman terhadap wawasan kebangsaan antara lain: 1) aspek negatif dari proses globalisasi, 2) perkembangan paham sub nasional, 3) pemikiran primordialisme, 4) gagasan nasionalisme sempit (*chouvinisme*), dan 5) pandangan yang berusaha memonopoli kebenaran.

Peran Jati Diri dan Wawasan Kebangsaan di Era Global

Kesadaran akan pentingnya peran jati diri suatu bangsa di era global telah semakin menguat dalam diri bangsa Indonesia. Berbagai kegiatan ilmiah dilaksanakan untuk itu,

seperti penelitian, dialog, sarasehan, *workshop*, dan seminar dengan tema jati diri bangsa dilakukan yang hakekatnya untuk menemukan kembali identitas bangsa Indonesia.

Jati diri, menurut Soemarsono (dalam Hasan, 2016), dianggap sebagai kesadaran tentang esensi keberadaan kita sebagai manusia, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan, yang disertai pemahaman kuat bahwa hidup adalah perjuangan. Wujud jati diri adalah cara berpikir, bertindak dan berkomunikasi anggota masyarakat, warga negara, pemerintah yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi kehidupan bangsa yakni Pancasila. Globalisasi membawa banyak perubahan terkait dengan jati diri dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan kecerdasan agar dapat bertahan dalam sebuah komunitas yang sarwa kompetisi dan kolaborasi baru. masyarakat harus dapat beradaptasi dan bekerja di dalam masyarakat didominasi oleh ide *flow*, yang menjadikan praktek kehidupan dengan ritme, kecepatan berpikir, desakan arus partisipasi yang sama dan juga bekerja sama dalam dinamika persaingan arus gagasan (Luddin, 2016). Menurut Muladi (dalam Nugroho. 2009), selaku Gubernur Lemhannas RI, beliau menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenaidiri dan lingkungannya , mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Ginanjar (dalam Hadi, 2006) menjelaskan bahwa rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Jati diri dan wawasan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia ibarat 'dua sisi mata uang', selalu bersatu dan saling memberi kadar atau nilai dalam pasar (Untari, 2012). Karena itu, penguatan jati diri akan memperluasan pengetahuan dan pemahaman akan wawasan kebangsaan. Dengan kata lain, semakin kuat kesejadian atau jati diri bangsa akan semakin meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan yang dimiliki suatu bangsa dan muaranya semakin mantap pula integrasi nasionalnya. Wawasan kebangsaan adalah kata kunci dalam membina, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam memperkokoh integrasi nasional.

Kebijakan Pemerintah dalam Memperkokoh Jati Diri dan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Bangsa Indonesia

Pembangunan bangsa dengan memperkokoh jati diri dan wawasan kebangsaan memiliki urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang juga disebutkan bahwa 1) jati diri sebagai karakter bangsa merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; 2) karakter berperan sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing; dan 3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, pembangunan karakter bangsa dengan memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaan akan mengerucut pada tiga tataran besar, yaitu: 1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, 2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.

Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa dalam upaya menjaga jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendiri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Kebijakan politik yang dilakukan Majelis Perwakilan Rakyat dengan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hakekatnya bertujuan agar identitas nasional tetap eksis (Wiyono, 2010). Di samping itu, ditetapkannya Ketetapan MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan berbangsa, pada hakekatnya bertujuan Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran akan jati diri ditandai adanya sikap dan perilaku meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan

kepribadiannya (Hadi. 2006). Salah satu kebijakan tersebut antara lain adanya Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti (GKBP) yang dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GKBP ini dilaksanakan di lingkungan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang secara substansinya pemahaman akan jati diri dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi penerus dalam menyongsong Indonesia emas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Peran kebijakan pemerintah dan program pembangunan yang tepat sangat diperlukan, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami suatu pergeseran atau perubahan yang signifikan dari semua sendi kehidupan. Semua dampak yang muncul dalam proses tersebut harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan guna memperkuat suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam menyongsong era yang semakin modern, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam koridor mencapai tujuan negara (Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012)

SIMPULAN

Jati diri dan wawasan kebangsaan sudah semestinya terus diperkuat jika bangsa dan negara Indonesia ingin tetap eksis sebagai bangsa yang menegara. Globalisasi sangat memengaruhi kemampuan bangsa dalam memperkuat jati diri dan memperkokoh wawasan kebangsaan. Banyak masalah yang dihadapi yang memerlukan kerja keras pemerintah dan bangsa secara bersama. Untuk itu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undang tidak cukup, perlu adanya suatu program seperti gerakan nasional yang artinya upaya memperkuat jati diri dan memperkokoh wawasan kebangsaan harus dipadang sebagai tanggung jawab bersama.

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan dalam memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan hendaknya ditanamkan sejak dini dalam seluruh lapisan masyarakat dan para penyelenggara negara, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia semakin kuat dalam menyongsong era yang semakin modern, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam koridor mencapai tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S., dkk .(2010). *Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks perguruan tinggi*. Malang: UM Press.
- Hadi, O.H. (2006). *Nation And character building melalui pemahaman wawasan kebangsaan*. Diunduh dari <http://www.tniad.mil.id/1artikel.php?pil=2&dn=20080711010639>
- Hasan, S. H. (2016). *Desain pendidikan untuk memperkuat jati diri bangsa*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Standar kompetensi lulusan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Draft pedoman pelaksanaan gerakan penumbuhan budi pekerti*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Rencana strategi kementerian pendidikan nasional tahun 2009-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Luddin. M. R. (2016). *Sparking identity dalam proses integrasi nasional*. Makalah dalam Seminar Nasional dan Kongres HISPISI ke 14 di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Noor, S. (2012). *Membudayakan integritas sistem kenegaraan Pancasila UUD Proklamasi 1945*. Makalah disampaikan dalam fasilitasi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional Indonesia Raya di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Nopember 2012.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: MPR RI.
- Untari, S. (2010). *Wawasan kebangsaan dalam membangun generasi emas Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang 20 Agustus 2010.
- Untari. S. (2012). *Wawasan kebangsaan bagi pemuda dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan*. Makalah disampaikan dalam Sarasehan yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kota Malang.
- Wiyono, S. (2012). *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Makalah dalam Seminar Nasional Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dalam rangka Penguatan Karakter Bangsa yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang.
- Wiyono. S. (2010). *Meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila*. Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional ‘Meneguhkan Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara’ di Hotel Santika Malang.
- Yudoyono, S. B. (2004) .*Menuju negara kebangsaan modern: Wawasan kebangsaan dan Indonesia masa depan*. Jakarta: Brighten Press.